

Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Muhammad Iqbal¹, Fathia Zuhra Nasution², Gendis Raihan Ardha³,
Raihani Azzahra Aljuned⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: muhammadiqbaldoely@gmail.com

Abstract : This mini-research aims to achieve the goals of an entity, a system of rules known as good corporate governance regulates interactions between various interested parties, or stakeholders. The goal of good corporate governance is to control these interactions, prevent strategic errors in an institution's plans, and ensure that errors can be corrected promptly. The National Committee for Governance Policy (KNKG) develops the principles of Good Corporate Governance which include Transparency, Accountability, Independence, Accountability and Fairness. These principles can help an institution achieve its goals.

Keywords: Application; Good Corporate Governance; Financial performance

Abstrak : Miniriset ini bertujuan untuk Untuk mencapai tujuan suatu entitas, sistem aturan yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik mengatur interaksi antara berbagai pihak yang berkepentingan, atau pemangku kepentingan. Tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk mengendalikan interaksi ini, mencegah kesalahan strategis dalam rencana suatu lembaga, dan menjamin bahwa kesalahan dapat segera diperbaiki. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengembangkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Akuntabilitas, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip ini dapat membantu suatu lembaga mencapai tujuannya.

Kata kunci: Penerapan; Good Corporate Governance; Kinerja Keuangan

LATAR BELAKANG

Untuk mencapai tujuan suatu entitas, sistem aturan yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik mengatur interaksi antara berbagai pihak yang berkepentingan, atau pemangku kepentingan. Tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk mengendalikan interaksi ini, mencegah kesalahan strategis dalam rencana suatu lembaga, dan menjamin bahwa kesalahan dapat segera diperbaiki. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengembangkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Akuntabilitas, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip ini dapat membantu suatu lembaga mencapai tujuannya. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan suatu lembaga sangatlah penting karena akan memberikan panduan yang jelas untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan menjadikan pengelolaan lembaga tersebut lebih dapat diandalkan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nilai lembaga tersebut.

Kinerja adalah kemampuan bekerja yang ditunjukkan oleh keluaran. Saat menggambarkan kondisi keuangan suatu lembaga, kinerja keuangan dapat diukur dengan cara

tertentu. Misalnya, merealisasikan pendapatan dan pengeluaran yang disusun berdasarkan basis akrual dapat menghasilkan informasi tentang seberapa baik suatu lembaga mengelola keuangannya. Penggabungan analisis statistik keuangan daerah dengan pemeriksaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memberikan landasan dalam penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.

Menggunakan Praktik yang Baik adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja lembaga organisasi. GCG adalah singkatan dari tata kelola perusahaan. Faktor penting dalam menentukan pentingnya hak atas informasi yang tepat waktu, tepat, dan benar adalah penerapan dan pengolahan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, hal ini merupakan tugas lembaga untuk memberikan 2 keterbukaan yang akurat, tepat waktu, dan transparan atas semua informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah.

Mengukur kinerja keuangan sangat penting untuk menentukan seberapa akuntabel pemerintah daerah dalam mengawasi anggaran daerah. Kemampuan untuk menunjukkan bagaimana dana publik digunakan hanyalah salah satu aspek akuntabilitas; kemampuan lainnya adalah kemampuan untuk menunjukkan penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif. Penganggaran yang efektif mencakup penggunaan keuangan dengan cara yang memenuhi tujuan dan sasaran publik, sedangkan penganggaran yang efisien memastikan bahwa jumlah produk yang dihasilkan sebanyak mungkin, kepentingan, dan ekonomis mengacu pada pilihan dan penerapan sumber daya dengan biaya serendah mungkin dalam jumlah dan kualitas tertentu (Mardiasmo, 2013:182).

Untuk mencapai praktik terbaik, Pemerintah Kota Medan masih mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Peraturan pemerintah yang mengacu pada pedoman tersebut dapat mendukung dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seharusnya dapat terlaksana dengan baik di lingkungan pemerintahan dengan didukung oleh pedoman tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Tahun Diberikan Uraian, Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian dan Konsep Dasar Good Corporate Governance (GCG)

Komite Cadbury menciptakan ungkapan “tata kelola perusahaan yang baik” pada tahun 1993 dan memasukkannya ke dalam laporan mereka, yang kemudian dikenal sebagai Laporan Cadbury. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandara (2008:24–25), “Suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan otoritas keberadaannya dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan,” laporan ini dianggap sebagai sebuah titik balik yang sangat menentukan praktik tata kelola perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan regulasi yang dimiliki oleh pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan individu lainnya.

Teori penata layanan dan teori keagenan adalah dua teori utama yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Asumsi konseptual yang mendasari teori penatalayanan adalah bahwa orang pada dasarnya dapat dipercaya, mampu bertindak secara terhormat, dengan kejujuran dan integritas terhadap orang lain. Dengan kata lain, teori stewardship meyakini bahwa manajemen dapat diandalkan untuk berperilaku demi kepentingan terbaik pemangku kepentingan dan publik. Menurut teori keagenan Michael Johnson, 8 manajer suatu lembaga harus bekerja sebagai "agen" bagi pemangku kepentingan, yang sepenuhnya sadar akan kepentingan mereka sendiri.

2. Faktor Keberhasilan Penerapan GCG.

Sebagaimana dikemukakan oleh KNKG (2009), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu instansi dalam menerapkan GCG, antara lain:

- a. Komitmen tulus pemerintah dalam menerapkan GCG secara metodis, terpercaya, dan berkelanjutan.
- b. Menetapkan struktur penerapan GCG di seluruh tingkatan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan anggota perusahaan dalam proses sosialisasi dan sosialisasi yang metodis, konsisten, dan berjangka panjang
- c. Integrasi sistem penerapan GCG dengan aturan dan kebijakan bisnis.
- d. Penerapan peran dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik di seluruh tingkat organisasi.
- e. Dukungan pemangku kepentingan
- f. Secara berkala, lembaga melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG atau menunjuk pihak lain yang memenuhi syarat dan tidak memihak untuk melakukan evaluasi tersebut.

3. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006), “Kinerja anggaran merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi.” Indikator kinerja, yang mempertimbangkan indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak, merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mencirikan tingkat pencapaian target atau sasaran yang telah ditentukan.

Kinerja, dalam kata-kata Mulyadi (2007), adalah kemampuan individu, kelompok, atau unit organisasi untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditentukan sekaligus menunjukkan perilaku yang diperlukan. Pencapaian atau derajat keberhasilan seseorang atau sekelompok orang yang telah menetapkan kriteria keberhasilan sering disebut dengan kinerja. Persyaratan tersebut berupa tujuan atau target tertentu yang harus dipenuhi. Tanpa tujuan atau target, kinerja individu atau organisasi tidak mungkin tercapai. karena tidak ada tolok ukur, hal ini tidak pasti. Analisis rasio keuangan APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya (Abdul Halim, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif, atau data yang berbentuk angka dan bukan bahasa, merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. atau studi yang menciptakan dan menerapkan teori, model, atau hipotesis matematika tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan sumber data dipilih dengan pertimbangan tertentu, dengan menggunakan strategi purposif dalam pemilihan subjek. Faktor- faktor spesifik ini bisa jadi adalah orang yang dianggap paling berpengetahuan tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia adalah figur otoritas yang akan memfasilitasi eksplorasi peneliti terhadap subjek atau konteks sosial yang diteliti. Hasil ini diperoleh. penggunaan wawancara. Selain itu, dokumentasi data, wawancara, dan observasi digunakan untuk mendapatkan temuan penelitian yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan teknik wawancara dan pengukuran rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, aktivitas, efisiensi, keselarasan modal, DSCR, dan pertumbuhan pendapatan, namun membatasi analisis pada rasio aktivitas, efisiensi, pertumbuhan pendapatan, dan prinsip, kami mengkaji bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik

telah meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pedoman GCG. Penulis menggunakan statistik keuangan yang merinci bagaimana Pemerintah Kota Medan mampu memenuhi anggarannya selama lima tahun terakhir, khususnya pada tahun 2014 hingga 2018. Analisis berikut dapat dilakukan berdasarkan hasil wawancara mengenai pemanfaatan GCG untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan:.

1. Keterbukaan dan kejujuran

Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkepentingan menerima informasi yang tepat waktu, cukup, jelas dan benar dari Pemerintah Kota Medan, yang dapat dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan lembaga ini dapat dilihat di www.pemkomedan.go.id. Setiap kegiatan korporasi yang telah selesai dalam dua hari kerja terakhir diumumkan oleh BPKAD. Selain agenda kerja sehari-hari, laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran, BPKAD juga menyajikan informasi dalam beberapa bentuk. Tunggal dan Amir (2002: 7) menyatakan bahwa hal ini mencakup pengungkapan informasi mengenai kinerja suatu instansi secara tepat waktu dan akurat (keterbukaan dalam proses, pengambilan keputusan, pengendalian, keadilan, keseragaman, efisiensi waktu dan biaya). Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk meningkatkan transparansi kinerja bisnis secara tepat dan sistematis. Menurut gagasan ini, suatu organisasi harus mampu menawarkan informasi yang relevan, signifikan, dan berharga. tepat, cepat, transparan, konsisten, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, karena publikasi informasi tersebut sangat penting untuk menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap suatu lembaga. Oleh karena itu, ketika menerbitkan laporan keuangan, lembaga tersebut harus mematuhi standar akuntansi dan audit yang diakui secara umum.

2. Akuntabilitas secara umum

Membentuk Komite Audit yang Independen dan Kompeten sebagai bagian dari penegakan aturan internal dan menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang baik hanyalah salah satu contoh bagaimana Pemerintah Kota Medan menaati ketentuan regulator dengan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dasar pemerintahan. kebijakan manajemen. Audit dengan anggota yang memiliki independensi, mampu bertindak sendiri, dan ahli di bidangnya. Selain itu, afiliasi Kota Medan, moralitas, dan kode etik pemerintah.

3. Akuntabilitas (Akuntabilitas)

Menurut teori ini, Pemerintah Kota Medan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk peraturan yang mengatur persaingan sehat, pajak, hubungan perburuhan, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan persyaratan upah.

Kewajiban pemerintah terhadap masyarakat sangatlah penting karena dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga pemerintah seringkali menimbulkan dampak yang tidak diinginkan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Iman dan Amin (2002: 8) mendefinisikan tanggung jawab perusahaan sebagai kewajiban sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingannya dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Prinsip ini mengatur bagaimana dunia usaha memenuhi kewajibannya terhadap seluruh pemangku kepentingan sebagai suatu entitas bisnis di masyarakat, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengendalian interaksi perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan (keseimbangan eksternal) guna menjadikan bisnis sebagai warga korporasi yang terhormat. Tata kelola Pemerintahan Kota Medan dan upaya peningkatan kualitas penerapan prinsip tersebut ditunjukkan melalui sejumlah kebijakan dan prosedur operasional. Misalnya, setiap instansi pemerintah diharapkan menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan cara pelaksanaan tugas tersebut dievaluasi, yang kemudian digunakan untuk menentukan jenjang karir dan besaran kompensasi yang akan diterima.

4. Kemandirian (Independency)

Menyusun dan mempraktekkan kode etik yang mencakup peraturan umum, transaksi, dan rencana realisasi anggaran yang mengandung atau mungkin mengandung benturan kepentingan. Larangan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara pegawai tetap dan pejabat tinggi pemerintah sampai batas tertentu. Dalam hal ini, pemerintahan dijalankan secara independen, dan agar suatu lembaga dapat mengambil keputusan secara obyektif, lembaga tersebut tidak boleh dikendalikan oleh salah satu pihak, bebas dari tekanan dari sumber mana pun, tidak memihak terhadap kepentingan tertentu, dan bebas dari konflik kepentingan. Iman dan Amin (2002: 8) menyatakan bahwa prinsip ini mengatur bagaimana lembaga harus mampu mencegah dominasi yang tidak dapat dibenarkan oleh pemangku kepentingan. Artinya, bisnis harus bebas dari tekanan atau pengaruh luar, memiliki rasa percaya diri yang lebih besar, dan lebih sadar akan keputusan yang diambil. Organisasi perlu bertindak cara terbaik untuk meningkatkan kinerja. dapat dipercaya, akurat, dan bebas dari prosedur evaluasi kelayakan yang bias. Ini juga akan membantu Anda tetap stabil secara finansial. Hadiah dalam bentuk apapun tidak diterima oleh Pemerintah Kota Medan. Sebab setiap instansi pemerintah mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh pegawainya agar dapat menjalankan peran dan kewajiban masing-masing.

5. Kewajaran (Fairness)

Dengan memperlakukan semua pihak secara adil sehubungan dengan hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada dan oleh lembaga tersebut, semua pihak akan memiliki lebih banyak akses terhadap informasi dan dapat memberikan rekomendasi untuk kemajuan dan peningkatan kualitas layanan lembaga tersebut. Namun pada kenyataannya, beberapa pekerja terus memanfaatkan fakta bahwa mereka memiliki kerabat yang memiliki pengaruh lebih besar dalam organisasi, sehingga penggunaan gagasan ini masih kurang efektif. Selain itu, ini digunakan saat merekrut, melatih, mengevaluasi, dan memilih jalur karier bagi anggota staf. Iman dan Amin (2002: 6) mengklaim bahwa dalam hal ini, penyalahgunaan, perdagangan, penipuan, dan penipuan oleh orang dalam semuanya dicegah agar tidak merugikan kepentingan pemangku kepentingan minoritas. Keadilan adalah ketika suatu bisnis memperlakukan semua 11 pihak yang berkepentingan secara setara dan sesuai dengan standar proporsionalitas yang sesuai. Konsep ini mengatur bagaimana komisaris dan manajer diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi pusat pertanggungjawabannya masing-masing. Keadilan dan kesetaraan juga digunakan dalam perekrutan, pelatihan, evaluasi, dan penentuan jalur karier karyawan. Namun pada kenyataannya, beberapa pekerja terus memanfaatkan fakta bahwa mereka memiliki anggota keluarga yang memiliki pengaruh lebih besar dalam organisasi, sehingga penerapan prinsip ini masih tidak efisien. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan mengenai penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja keuangan, Pemerintah Kota Medan telah menerapkan GCG dengan baik di sejumlah daerah. Namun masih terdapat penerapan prinsip pemerataan dan kesetaraan yang berdampak pada rendahnya penerapan GCG di pemerintahan. Hal ini masuk akal mengingat teori yang dikemukakan. Diah Kusuma (2008: 16) menegaskan bahwa metode GCG dapat meningkatkan kinerja suatu lembaga dan menurunkan kemungkinan Dewan membuat penilaian yang mementingkan diri sendiri. Secara umum, GCG dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, yang berdampak pada seberapa baik kinerjanya. Selain penerapan GCG yang kurang baik, kinerja keuangan juga tidak efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada pemerintah Kota Medan belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, berdasarkan temuan penelitian dan analisis GCG dalam meningkatkan rasio keuangan daerah pada pemerintah Kota Medan. Penurunan rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan hal tersebut. Apa pengaruh nilai-nilai keadilan dan kesetaraan

terhadap penerapan GCG yang masih belum sempurna. Untuk mencapai praktik terbaik, Pemerintah Kota Medan masih mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Peraturan pemerintah yang mengacu pada pedoman tersebut dapat mendukung dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seharusnya dapat terlaksana dengan baik di lingkungan pemerintahan dengan didukung oleh pedoman tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim dkk, (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Chatime, B. (2013). Corporate Governance dan Kebijakan Audit. Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Latief, A. (2019). Corporate Governance dan dampaknya terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.20, 111–112.
- Sari, M. (2015). Analisis good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. JasaMarga (Persero) Tbk